

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Demografis

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sukodono berjalan fluktuatif dalam lima tahun terakhir dengan tingkat kepadatan penduduk yang bervariasi. Hal tersebut difaktori oleh mortalitas dan natalitas serta migrasi dan urbansasi penduduk. Tingkat penduduk Desa Sukodono tergolong sedang jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang berada di Kecamatan Tahunan. Adapun jumlah penduduk Desa Sukodono dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Desa Sukodono dari Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kepadatan Per Km ²
1.	2019	6.849	3,761
2.	2020	6.944	3,489
3.	2021	6.124	3,078
4.	2022	5.994	3,018
5.	2023	6.099	3,351

Sumber: Potensi Desa Sukodono Tahun 2019-2022

Berdasarkan tabel di atas, data menunjukkan bahwa pada tahun 2019, jumlah penduduk Desa Sukodono sekitar 6.849 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 3,761 km². Jumlah penduduk tersebut meningkat pada tahun 2020, yakni sekitar 6.944 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 3,489 km². Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 yang mana jumlah penduduknya menjadi 6.124 jiwa, diikuti dengan penurunan tingkat kepadatan penduduk pada angka 3,078 km². Pada tahun 2022, jumlah penduduk Desa

Sukodono kembali menurun menjadi 5.994 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 3,018 km². Sementara berdasarkan pada data terbaru tahun 2023 jumlah penduduk kembali mengalami peningkatan sekitar 6.099 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 3,351 km².

B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk perempuan di Desa Sukodono lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Desa Sukodono Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	2019	3.457	3.392
2.	2020	2.608	2.595
3.	2021	2.332	2.225
4.	2022	3.038	2.956
5.	2023	3.105	3.009

Sumber: Potensi Desa Sukodono Tahun 2019-2023

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3.457 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 3.392 jiwa. Sementara pada tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki sekitar 2.608 jiwa dan perempuan 2.595 jiwa. Pada tahun 2021, jumlah penduduk laki-laki 2.332 jiwa dan perempuan 2.225 jiwa; tahun 2022 jumlah penduduk laki-laki 3.038 jiwa dan perempuan 2.956 jiwa; serta pada tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki 3.105 jiwa dan perempuan 3.009 jiwa.

C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia

Penduduk Desa Sukodono cukup bervariasi berdasarkan golongan usia

dimulai dengan penduduk batita, anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa, hingga penduduk lanjut usia atau lansia. Adapun penduduk Desa Sukodono berdasarkan golongan usia secara lebih detail dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Desa Sukodono Berdasarkan Golongan Usia

No.	Rentang Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan
1.	0-4	154	164
2.	5-9	218	194
3.	10-14	256	239
4.	15-19	219	235
5.	20-24	247	244
6.	25-29	234	210
7.	30-34	169	189
8.	35-39	214	219
9.	40-44	324	276
10.	45-49	281	281
11.	50-54	268	201
12.	55-59	150	138
13.	60-64	144	158
14.	65-69	95	97
15.	70-74	59	65
16.	75	7	84
17.	75+	41	84
Total		3.105	3.009

Sumber: Potensi Desa Sukodono Tahun 2023

Berdasarkan data terbaru dari BPS Kabupaten Jepara tahun 2023 di atas, Desa Sukodono didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64) tahun, yakni 4.401 jiwa dengan presentase jumlah penduduk paling banyak sekitar 71,98 % dari total keseluruhan penduduk desa tersebut. Sementara itu, jumlah penduduk berdasarkan golongan usia paling sedikit ditempati oleh penduduk usia tidak produktif (65-75 tahun ke atas), yakni 532 jiwa atau sekitar 8,7 %.

D. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Masyarakat Desa Sukodono memiliki motivasi dan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan yang ditunjukkan dengan data banyaknya masyarakat yang telah mengakses fasilitas pendidikan. Pada tahun 2023, masyarakat yang belum mengenyam pendidikan berjumlah 259 orang (4,23%) dari total keseluruhan penduduk Desa Sukodono, 1.315 orang sedang bersekolah (21%), sedang menempuh perguruan tinggi 103 orang atau (1,69%), telah tamat menempuh pendidikannya 3.898 orang atau (63,7%), serta 405 orang tidak menamatkan pendidikannya atau (6,6%). Adapun jumlah masyarakat Desa Sukodono berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Pendudukan Desa Sukodono Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Buta aksara dan latin	43
2.	Cacat mental dan fisik	26
3.	Belum sekolah	259
4.	Sedang menempuh TK/ Sederajat	313
5.	Sedang menempuh SD	529
6.	Tamat SD/Sederajat	1.549
7.	Tidak tamat SD/Sederajat	389
8.	Sedang menempuh SLTP/Sederajat	277
9.	Tamat SLTP/Sederajat	721
10.	Tidak tamat SLTP/Sederajat	16
11.	Sedang menempuh SLTA/Sederajat	196
12.	Tamat SLTA/Sederajat	1.135
13.	Sedang Menempuh Diploma I/ Diploma II/Diploma III/ Diploma IV/Srata 1/Srata II	103
14.	Tamat Perguruan Tinggi	297
15.	Sedang SLB B/C	2

Sumber: Perkembangan Desa Sukodono Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel 2.5 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Sukodono hanya menamatkan pendidikan Sekolah

Dasar (SD) sekitar 1.549 orang. Pada posisi kedua ditempati oleh penduduk yang mengenyam pendidikan di bangku SLTA sejumlah 1.135 orang serta posisi ketiga ditempati masyarakat yang menamatkan bangku SLTP sekitar 1.135 orang. Sementara itu, jumlah masyarakat yang mengambil pendidikan jenjang lanjutan Diploma III, S1, dan S2 masih sedikit sekitar 205. Meskipun demikian, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat pesisir Desa Sukodono tergolong baik.

E. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Sukodono mayoritas bermata pencaharian pada sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga pada industri mebel sekitar 832 orang atau 13,6%. Mata pencaharian yang paling rendah digandrungi masyarakat Sukodono terdapat pada sektor perdagangam hasil bumi sekitar 2 orang atau 0,03%. Namun, mata pencaharian masyarakat Desa Sukodono cukup bervariasi yang mana sebagian masyarakat lain berprofesi sebagai karyawan swasta, wiraswasta, buruh harian lepas, dll. Sementara itu, jumlah masyarakat yang belum bekerja 674 oran serta tidak memiliki pekerjaan tetap sekitar 229 orang. Adapun jumlah penduduk Desa Sukodono berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Desa Sukodono Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan
1.	Tukang kayu	762	70
2.	Wiraswasta	113	41
3.	Ibu Rumah Tangga	0	934
4.	Belum bekerja	208	466
5.	Petani	32	26
6.	Karyawan Perusahaan Swasa	153	186
7.	Pelajar	436	455

8.	Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	1	1
9.	Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi	2	0
10.	Pegawai Negeri Sipil	22	19
11.	TNI	1	0
12.	POLRI	2	1
13.	Guru Swasta	15	39
14.	Dosen Swasta	4	0
15.	Dokter Swasta	12	0
16.	Perawat Swasta	0	2
17.	Perangkat Desa	6	4
18.	Buruh Migran	8	3
19.	Pengusaha Kecil, Menengah, Besar	41	9
20.	Dukun	5	1
21.	Tukang Batu	28	0
22.	Pembantu Rumah Tangga	0	24
23.	Pedagang Keliling	2	12
24.	Seniman	4	0
25.	Pedagang Barang Kelontong	8	54
26.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	15	16
27.	Jasa	28	148
28.	Buruh Harian Lepas	177	148
29.	Pemilik Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	17	0
30.	Pemilik Usaha Informasi dan Komunikasi	8	0
31.	Buruh Usaha Informasi dan Komunikasi	5	8
32.	Pemuka agama	18	1
33.	Pengrajin industri rumah tangga lainnya	38	14
34.	Karyawan Honorer	2	5
35.	Tidak/Belum Memiliki Pekerjaan Tetap	121	108
36.	Akuntan	1	1
37.	Satpam	2	0
38.	Penyiar radio	0	1
39.	Apoteker	0	2
40.	Peternak	39	18
41.	Pengrajin	35	3
42.	Pensiunan	4	6
43.	Sopir	29	0
44.	Montir	12	0
45.	Pemulung	2	1
46.	Pemilik Usaha Warung, Rumah Makan, dll	6	25

47.	Buruh Usaha Jasa Hiburan, Pariwisata, Hotel, dan Penginapan	5	6
48.	Jasa Pengobatan Alternatif	4	2
TOTAL		6.114	

Sumber: Potensi Desa Sukodono Tahun 2023

2.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Pada tahun 2023, terdapat 3.577 angkatan kerja atau 58.64% dari total keseluruhan penduduk Desa Sukodono. Kualitas angkatan kerja masyarakat Desa Sukodono paling tinggi ditempati oleh tamata SLTA, yakni 1.135 orang. Diikuti oleh angkatan kerja tamatan SD sekitar 1.131 orang yang menempati posisi kedua. Sementara itu, posisi ketiga diisi oleh angkatan kerja tamatan SLTP sekitar 703 orang. Pada tahun itu, pendapat angkatan kerja tersebut tergolong sedang yang mana dapat dilihat pada pendapat perkapita untuk setiap rumah tangga mencapai angka Rp 1.500.000,00. Sementara itu, jumlah pendapat riil setiap kepala keluarga sebesar Rp 1.945.000,00, sedangkan jumlah pendapat riil dari anggota keluarga yang bekerja sebesar RP 1.050.000,00.

Mayoritas penduduk Desa Sukodono, yakni sekitar 1.093 orang atau 18% dari mereka menggeluti sektor industri kecil & kerajinan rumah tangga. Dari angka 18% tersebut, 13% dari mereka atau 850 orang merupakan tukang kayu pada industri mebel. Industri mebel di Desa Sukodono telah dimulai sejak tahun 1940-an. Pada awalnya, mereka hanyalah tukang pembuat rumah atau biasa disebut sebagai tukang omah. Mereka kemudian berkembang cukup besar sebagai kelompok pengrajin mebel dan seni ukir kayu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

Sumantono tahun 1997 yang berjudul "Desain Ukir Jepara: Kajian tentang Kreativitas Seni pada Masyarakat Pengrajin Ukir Kayu di Desa Sukodono, Jepara, Jawa Tengah" menunjukkan hasil bahwa masyarakat Desa Sukodono merasa bahwa keahlian mereka dalam membuat ukiran kayu dan produksi mebel merupakan hasil warisan dari keahlian nenek moyang mereka, sehingga secara turun-temurun keahlian tersebut tetap eksis hingga sekarang yang menjadi mereka mayoritas bermatapencarian di sektor industri mebel.

2.4 Kondisi Sosial Politik

A. Kondisi Pemerintahan

a) Visi-Misi Desa Sukodono

“Terwujudnya masyarakat Desa Sukodono yang bersih, religius, sejahtera, rapih, dan indah melalui akselerasi pembangunan yang berbasis keagamaan, budaya, hukum, dan berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kerja aparatur dan pemberdayaan masyarakat lokal.” Guna mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Desa Sukodono memiliki 10 misi sebagai berikut:

1. Melanjutkan pembangunan dan pengembangan desa yang belum terlaksana
2. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang telah dibentuk
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sukodono melalui sarana dan prasarana ekonomi warga

4. Melestarikan dan menjaga adat istiadat warisan leluhur terutama adat istiadat yang telah mengakar di Desa Sukodono
5. Optimalisasi pelayanan dalam bidang pemerintahan terhadap masyarakat Desa Sukodono
6. Optimalisasi dan memperbaiki sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa Sukodono
7. Optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu kualitas SDM masyarakat Desa Sukodono

2.5 Desa Anti Politik Uang

Desa Antipolitik Uang merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah sebagai salah satu kebijakan antikorupsi dalam menyambut perhelatan Pemilu 2019. Pemilu sendiri tak lekang diwarnai praktik politik uang yang kian hari kian marak. Untuk itu, Program Desa Antipolitik Uang (DAPU), dirancang oleh Bawaslu Jateng guna membentuk kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang yang membahayakan kualitas demokrasi Indonesia.

Program ini merupakan bagian dari strategi pencegahan Bawaslu terhadap pelanggaran pemilu, di mana masyarakat desa diajak untuk secara aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu serta menolak segala bentuk politik uang. Rangkaian kegiatan DAPU mencakup sosialisasi, pendidikan politik, dan pembentukan kelompok-kelompok sadar pemilu di tingkat desa. Kegiatan-kegiatan tersebut pada nantinya diharapkan dapat menumbuhkan komitmen untuk menolak praktik politik uang yang diberikan oleh kandidat

pemimpin menjelang hari pemungutan suara.

Berdasarkan data terbaru dari Bawaslu Jawa Tengah, dari 8.562 total keseluruhan Desa/Kelurahan di Jawa Tengah, terdapat total 599 yang terdiri dari 315 Desa yang tercatat telah diremiskan sebagai Desa Antipolitik Uang serta 284 desa lainnya masih menjadi Desa Pengawasan. Masing-masing dari DAPU tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang melatarbelakangi mengapa desa tersebut pada akhirnya diresmikan menjadi DAPU. Di Jawa Tengah sendiri, dari 36 Kabupaten/Kota, Kabupaten Magelang menjadi kabupaten pertama yang menjalankan instruksi dari Bawaslu Jateng untuk membentuk Desa Antipolitik Uang pada tahun 2018 dalam rangka menyambut Pemilu 2019. Pada akhirnya, pasca pembentuka DAPU di Kabupaten Magelang, sebanyak 35 Bawaslu Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah turut membentuk DAPU dan menjadikan program tersebut sebagai *pilot project* bagi daerah-daerah lainnya, seperti halnya Kabupaten Jepara yang telah menginisiasi tujuh Desa Antipolitik Uang yang meliputi, Desa Sukodono kecamatan Tahunan, Desa Tempur Kecamatan Keling, Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa, Desa Banjar Agung Kecamatan Bangsri, Desa Dongos Kecamatan Kedung, Desa Kalianyar Kecamatan Kedung, serta Desa Papasan Kecamatan Keling. Desa-desa yang diresmikan sebagai Desa Antipolitik Uang tentunya tidak hanya asal dipilih, melainkan melalui proses pemantau dari Bawaslu setempat untuk menilai mana saja desa yang telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan menjadi DAPU.

Menurut Ketua Bawaslu Jawa Tengah, terdapat kriteria dalam

proses penentuan desa yang akan dipilih sebagai DAPU yang meliputi dua hal. Pertama, perlu memperhatikan kondisi terdalam, terluar dan tertinggal dari suatu desa. Kedua, perlu memperhatikan rekam jejak desa yang terdapat kasus politik uang. Dua unsur inilah menjadi kriteria umum yang dapat dijadikan landasan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota lain untuk mengembangkan Desa Antipolitik Uang yang sesuai kondisi sosial-politiknya.

Pembentukan DAPU sendiri terdiri dari tiga tahapan, yakni tahap persiapan, pelaksanaan serta tindak lanjut Sementara itu, keberhasilan DAPU sendiri ditentukan sejauh mana tahapan-tahapan tersebut diterapkan dengan baik sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dengan begitu DAPU tidak hanya boleh bagus dalam tahap persiapan dan pembentukannya saja. Akan menjadi sia-sia apabila pada tahapan tindak lanjutnya buruk. Maka dari itu, tiga tahapan ini harus dilakukan secara optimal dan terintegrasi satu sama lain. Adapun, tahapan pembentukan Desa Antipolitik Uang menurut Bawaslu Jawa Tengah dijabarkan lebih lanjut dalam table berikut di bawah ini:

Tabel 2.10
Tahapan Pembentukan Desa Anti Politik Uang (DAPU)

NO	Persiapan	Pembentukan	Tindak Lanjut
1.	Menentukan desa yang akan dijadikan sasaran pembentukan DAPU;	Melakukan koordinasi dengan stakeholder desa dan berbagai komponen yang ada di masyarakat;	Pembentukan forum diskusi bertema kepemiluan yang melibatkan masyarakat;
2.	Menyiapkan desain DAPU;	Penyusunan program kerja DAPU;	Melibatkan masyarakat DAPU dalam setiap kegiatan sosialisasi Bawaslu Kabupaten;
3.	Melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat dan agama, komunitas dan masyarakat secara umum;	Menyusun materi, metodologi dan jadwal sosialisasi;	Melakukan pengkaderan dan pendampingan kelompok sasaran;
4.	Peneguhan komitmen masyarakat secara umum untuk menjadi aktor yang menolak praktik politik uang.	Melakukan pendokumentasian kegiatan deklarasi DAPU; dan	Mendorong pemerintah desa membentuk gugus depan khusus untuk melestarikan program DAPU.
5.		Melaksanakan lomba penulisan dan foto DAPU.	

(Sumber: Pedoman Pembentukan DAPU Bawaslu Jawa Tengah 2019)

Pasca tahap pembentukan, guna memperkuat program Desa Antipolitik Uang, Bawaslu bekerja sama dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal untuk memastikan program ini berjalan efektif. Selain itu, dilakukan juga pemantauan secara berkala dan evaluasi

terhadap implementasi program ini untuk memastikan bahwa tujuan yang diharapkan dapat tercapai (Kurniawan & Hidayat, 2023). Tidak hanya itu, untuk menindaklanjuti rangkaian kegiatan pasca tahap penetapan DAPU, maka Bawslu membentuk relawan pengawasan yang dibentuk di setiap RT. Merka nantinya akan memberikan pendidikan politik dan menyebarkan informasi tentang bahaya politik uang kepada warga desa. Dengan begitu, maka akan terbentuk pemahaman mendalam terkait bahaya politik uang dan pentingnya Program DAPU sebagai salah satu strategi untuk memberantas politik uang. Pemahaman yang baik terkait hal tersebut, akan membentuk suatu kesadaran dari masyarakat bahwa sangat penting untuk turut terlibat secara aktif dalam mengawasi jalannya pemilu, melaporkan adanya pelanggaran, dan menolak segala bentuk politik uang.